

AUTENTISITAS SUMBER SEJARAH PANCASILA DALAM MASA SIDANG PERTAMA BADAN UNTUK MENYELIDIKI USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN TANGGAL 29 MEI-1 JUNI 1945

Aris Hardinanto
email: aris@trunojoyo.ac.id

Abstract

This article seeks to compare different ideas concerning Indonesian statehood as put forth by our founding father in sessions of the Dokuritsu Zyunbi Tyosa Kai (Investigating Body for Preparing Indonesia's Independence). The author notes that there is doubt as to the authenticity of documents recording the debates and the speeches made during meetings held by this body (28 May-1 June 1945 & 10 July-17 July 1945). On one side, there are the preparatory documents of the 1945 Constitution as issued by Muhammad Yamin and which is regarded by the State Secretariat as the one and only authentic source (from 1959-1992). On the other hand, notes collected by Pringgodigdo and Yamin were later used as the basis for the publication of the Body's minutes of meetings in 1995. The author observes that both collections (Yamin and Pringgodigdo) differ in their exposure of ideas on the Indonesian statehood put forth during the Body's meetings.

Keywords:

preparatory documents, Pringgodigdo's collection, Yamin's collection, Pancasila

Abstrak

Tulisan ini hendak membandingkan risalah dari sidang-sidang Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai atau dikenal dengan sebutan Badan Untuk Menyelidiki Usaha Persiapan Kemerdekaan (28 Mei 1945-1 Juni 1945 dan 10 Juli 1945-17 Juli 1945). Penulis mencatat adanya keraguan akan autentisitas dari dokumen atau risalah rapat-rapat Badan ini. Pada satu pihak, Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945 karya Muhammad Yamin oleh Sekretariat Negara dianggap sumber yang autentik sehingga dijadikan satu-satunya sumber penerbitan Risalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan sejak tahun 1959 hingga tahun 1992. Pada lain pihak, pada 1995, diterbitkan edisi ketiga yang memuat perbandingan naskah BPUPKI koleksi Pringgodigdo dengan koleksi Yamin. Catatan yang dapat dibuat adalah adanya perbedaan prinsipil tentang usulan dasar Indonesia merdeka antara kedua koleksi di atas.

Kata kunci:

naskah persiapan, koleksi Pringgodigdo, koleksi Yamin, Pancasila

Pendahuluan

Kemerdekaan pada hakikatnya merupakan hak setiap bangsa yang ada di dunia, tanpa terkecuali. Indonesia dalam meraih kemerdekaannya melalui dua usaha, yaitu usaha diplomasi dan konfrontasi. Perjalanan meraih kemerdekaan sejak zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang dipandang sebagai sebuah fase sejarah.

Sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹ salah satu artinya adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Artinya segala bentuk peristiwa atau hal-hal yang berkaitan dengan usaha-usaha bangsa Indonesia ketika akan meraih kemerdekaan, berdasarkan arti istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disebut sebagai sejarah.

Jepang mendarat di Hindia Belanda pertama kali pada tanggal 10 November 1942.² Masa pendudukan Jepang dapat dianggap sebagai masa dimana secara formal usaha-usaha untuk meraih kemerdekaan diselenggarakan. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, kemudian di tengah terdesaknya Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya, dijanjikan kepada Indonesia bahwa akan dimerdekakan oleh Jepang suatu hari nanti. Realisasi janji tersebut ditandai dengan dibentuknya *Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai* pada tanggal 29 April 1945.³

Badan dengan nama Jepang *Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai* sering diterjemahkan sebagai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (selanjutnya disebut BPUPK), tambahan kata Indonesia kurang tepat karena kata tersebut tidak ada dalam istilah aslinya. BPUPK memiliki dua masa sidang, yaitu masa sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan masa sidang kedua pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945.⁴ Anggota BPUPK terdiri atas *Kaityo* (Ketua), *Fuku Kaityoo* (Wakil Ketua), 60 orang *lin* (anggota) ditambah 8 orang *Tokubetu lin* (anggota kehormatan) dari pihak Jepang. Jalannya persidangan dicatat oleh para notulis dan stenografer yang disediakan oleh Tata Usaha BPUPK. Mereka mengambil notulen dengan tulisan tangan biasa tetapi juga dengan steno. Pidato yang jelas diambil dengan steno ialah pidato Ir. Soekarno yang kemudian dikenal dengan pidato "Lahirnya Pancasila". Tipe stenografinya kemudian dikenal sebagai stenografi sistem Karundeng.⁵

¹ <http://kbbi.web.id/sejarah>, diakses 22 Januari 2017

² A. G. Pringgodigdo, *Tatanegara di Djawa Pada Waktu Pendudukan Djepang dari Bulan Maret sampai bulan Desember 1942*, Jajasan Fonds Universitit Negeri Gadjah Mada, Jogkajarta, 1952, hlm., 5.

³ A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm., 10.

⁴ Id., hlm. 457

⁵ Lembaga Soekarno-Hatta, *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila*, Jakarta, 1986, hlm., 32.

Kebenaran pidato-pidato anggota BPUPK yang diambil dengan menggunakan stenografi tersebut juga diperkuat dengan keterangan dari dua stenografer BPUPK, yaitu Sumarti T.B. Simatupang dan Netty Karundeng. Menurut mereka berdua, setelah stenogram tersebut selesai dikumpulkan, kemudian diketik.⁶ Kelak salah satu salinan stenografi tersebut dipinjam oleh Muhammad Yamin dari Wakil Ketua Tata Usaha BPUPK A.G. Pringgodigdo. Setelah meminjam hasil ketikan stenografi tersebut, pada tahun 1959 Muhammad Yamin menerbitkan buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 yang didasarkan oleh hasil ketikan stenografi itu, naskah asli hasil ketikan tersebut tidak pernah dikembalikan Muhammad Yamin kepada A.G. Pringgodigdo sampai akhir hayatnya.

Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut Naskah Persiapan) dianggap autentik karena merupakan kata demi kata (*woordelijk*) dari notulen sidang (*notulistisch verslag*) BPUPK⁷, sehingga sampai tahun 1992 dijadikan sumber utama penerbitan Sekretariat Negara. Buku terbitan Sekretariat Negara tersebut berjudul Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 (selanjutnya disebut Risalah BPUPK 1).⁸ Pada tahun 1995 diterbitkan risalah sidang (selanjutnya disebut Risalah BPUPK 2) dengan tambahan dua sumber tertulis lainnya, yang oleh para penyunting Risalah BPUPK 2 disebut Koleksi Pringgodigdo dan Koleksi Yamin. Berdasarkan hal tersebut, sumber-sumber tertulis lengkap mengenai sidang BPUPK adalah Naskah Persiapan, Koleksi Yamin, dan Koleksi Pringgodigdo. Risalah BPUPK 1 dan Risalah BPUPK 2 secara garis besar tetap mendasarkan pada Naskah Persiapan dengan tambahan bahan Koleksi Pringgodigdo dan Koleksi Yamin disertai catatan kaki dari kedua koleksi tersebut sebagai perbandingan.

⁶ Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Sekretariat Negara, Jakarta, 1998, hlm., 691-692.

⁷ Nugroho Notosutanto, Proses Perumusan Pancasila Dasar Indonesia Merdeka, Balai Pustaka, Jakarta, 1981, hlm., 18.

⁸ Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Sekretariat Negara, Jakarta, 1995, xxviii-xxix.

Naskah Persiapan dengan Koleksi Pringgodigdo dan Koleksi Muhammad Yamin memiliki persamaan serta perbedaan.⁹ Jika terdapat perbedaan Naskah Persiapan dengan Koleksi Pringgodigdo dan Koleksi Muhammad Yamin, maka Risalah BPUPK 1 dan Risalah BPUPK 2 yang diterbitkan Sekretariat Negara tidak dapat dijadikan rujukan karena sumber yang dijadikan dasar oleh Sekretariat Negara berbeda dengan sumber utamanya. Maka permasalahan yang muncul adalah, bagaimana autentisitas Naskah Persiapan, Koleksi Pringgodigdo dan Koleksi Yamin sebagai sumber tertulis sejarah perumusan istilah Pancasila pada masa sidang BPUPK 29 Mei-1 Juni 1945?

Penelitian hukum ini dilakukan menggunakan pendekatan historis (*historical approach*)¹⁰, yaitu pendekatan dalam kerangka pelacakan sejarah, dalam hal ini untuk mengetahui latar belakang munculnya istilah Pancasila sebagai dasar Indonesia dalam masa sidang pertama BPUPK.

Pembahasan

Notulen dan stenogram sidang BPUPK diketik untuk kemudian dijilid sebagai laporan kepada pihak Jepang dikumpulkan oleh A.G. Pringgodigdo selaku Wakil Ketua Tata Usaha BPUPK. Kepala Tata Usaha dari BPUPK adalah Raden Panji Soeroso yang berdomisili di kota Magelang. Berdasarkan domisili yang jauh dari Jakarta tersebut, maka urusan tata usaha sehari-hari dipegang oleh Wakil Kepala Tata Usaha, dalam hal ini adalah A.G. Pringgodigdo. Pihak Jepang mempercayakan kepada A.G. Pringgodigdo karena namanya tertera sebagai sekretaris Komisi Visman, sebuah komisi yang dibentuk untuk mencermati perkembangan ketatanegaraan di Hindia-Belanda.¹¹

Formulasi Pancasila dalam masa sidang pertama BPUPK tercantum dalam beberapa sumber tertulis, baik berupa dokumen dan buku. Sumber tertulis pertama adalah laporan notulen dan stenogram dalam bundel Koleksi Yamin. Laporan stenogram yang sudah diketik tersebut mengingat sangat penting untuk

⁹ Id., hlm., xv

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm., 129.

¹¹ A. G. Pringgodigdo, *Perjuangan Bangsa Indonesia Menegakkan Pancasila Dalam Masa Penjajahan/Pendudukan Jepang*, 1981, hlm., 122-123.

segera dikirimkan kepada pihak Jepang di Tokyo, setelah dilakukan pengetikan, tidak lagi diperiksa. Menurut A.G. Pringgodigdo, ada 4 jilid laporan stenogram, dua jilid diserahkan kepada Jepang dan sisanya disimpan sendiri di kantor dan rumahnya.¹² Laporan yang diarsipkan A.G. Pringgodigdo dikenal dengan nama Koleksi Yamin dikarenakan laporan inilah yang dipinjam oleh Muhammad Yamin sebagai sumber menyusun Naskah Persiapan dan tidak pernah dikembalikan, kemudian oleh pemerintah Orde Baru dinyatakan hilang. Koleksi Yamin ditemukan kembali di Puri Mangkunegaran, Surakarta. Saat itu B.R.A Satuti istri dari Rahadian Yamin yang merupakan putera Muhammad Yamin meminta karyawan Arsip Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disebut ANRI) untuk merapihkan perpustakaan Mangkunegoro. Koleksi Yamin dianggap telah hilang seiring dengan meninggalnya Muhammad Yamin. Setelah karyawan ANRI menemukan Koleksi Yamin di perpustakaan tersebut, maka dibawa untuk disimpan di gedung ANRI Jakarta.¹³

Sumber tertulis kedua setelah Koleksi Yamin adalah Koleksi Pringgodigdo. Koleksi tersebut awalnya berada di ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta, saat terjadi agresi militer II Belanda, menurut A.B. Kusuma dan R.E. Elson koleksi tersebut disita lalu di bawa ke negeri Belanda.¹⁴ Menurut M.J. Karabinos, saat pasukan Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948, ratusan dokumen tentang Republik Indonesia selain Koleksi Pringgodigdo juga disita oleh Belanda, termasuk di dalamnya dokumen pribadi milik Mohammad Hatta.¹⁵ Dokumen-dokumen tersebut sekarang sudah dikembalikan kepada ANRI dan dinamai dengan nama "*Djodgja Documenten*". Koleksi Pringgodigdo awalnya disimpan di *Algemeen Rijksarchief* kemudian disimpan oleh *Nationaal Archief Nederland*.¹⁶

¹² Id., hlm., 133.

¹³ Supra no. 3, hlm., 3.

¹⁴ <http://www.jstor.org/stable/41288761?origin=JSTOR-pdf>, diakses tanggal 25 Januari 2017

¹⁵ <https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/33293/9/03.pdf>, diakses tanggal 25 Januari 2017.

¹⁶ Peneliti perlu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Professor (Em) R.E. Elson dari University of Queensland Brisbane yang telah memberikan salinan *Algemene Secretarie En De Daarbij Gedeponeerde Archieven* (1942-1950) yang memuat *Archivalia van Raden Mas mr A.G. Pringgodigdo, destijds Secretaris van Staat van de Republiek Indonesië* No. 5645-5647 milik Arsip Nasional Belanda.

Menurut catatan dari *Nationaal Archief Nederland*, Koleksi Pringgodigdo telah dikembalikan kepada ANRI pada tahun 1987. Koleksi Pringgodigdo secara lengkap bernama *Archivalia van R.M.MR. Abdul Gaffar Pringgodigdo, Secretaris van Staat van de Republiek Indonesie 1944-1945*. Dahulu Koleksi Pringgodigdo dianggap sebagai koleksi milik adik A.G. Pringgodigdo, yaitu A.K. Pringgodigdo. Koleksi Pringgodigdo memuat:

Nomor	Judul	Keterangan
5641	Keputusan Jepang berkenaan dengan tugas Dewan Sanyo dan kewenangan pemerintah Indonesia, khususnya pemerintahan di tingkat Kecamatan. Stensil. Tanpa tanggal. Desember 1944	1 jilid
5642	Notulensi rapat-rapat dari Dewan Sanyo Desember 1944	1 jilid
5643	Laporan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pekerjaan Dewan Sanyo di bidang penyediaan dan distribusi pangan serta pemanfaatan lahan Desember 1944 – Pebruari 1945	1 jilid
5644	Konsep notulensi rapat Dewan Sanyo untuk membicarakan hari-hari raya dan libur, Pebruari 1945	1 jilid
5645	Laporan rapat, notulensi, dan catatan perihal rapat-rapat Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai (Badan untuk Menjelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang muncul darinya. Mei-Agustus 1945.	1 jilid
5646	Dokumen tentang usulan UUD Indonesia, pertahanan Negara, keuangan Negara dan ekonomi. Tanpa tanggal (medio 1945)	1 jilid
5647	Indonesia merdeka selesak-lekasnya, manifesto sebagaimana dinyatakan oleh anggota Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai. Dua versi dengan duplikat Tanpa tanggal (1945)	1 jilid
5648	Nota perihal kedudukan Islam dalam Negara Indonesia merdeka. Tanpa tanggal (1945)	1 jilid
5649	Struktur Organisasi dan Tata Kerja untuk pemerintah Indonesia menurut usulan Gerakan Angkatan Muda; dengan duplikat. Tanpa tanggal (1945)	2 lembar
5650	33 Fatsal Gerakan Hidoep Baroe; memuat pedoman hidup sebagaimana diajukan oleh Gerakan Hidup Baru tersebut. Tanpa tanggal (1945)	1 lembar
5651	Pengumuman resmi dan publikasi diterbitkan oleh Republik Indonesia dan organisasi kepemerintahan di bawahnya. Stensil. September-Oktober 1945.	1 jilid
5652	Mosi, pernyataan, telegram dan surat-surat yang dibuat oleh organ-organ pemerintahan, perkumpulan dan orang-perorang yang disampaikan pada Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta dan Sekretariat Negara September-Oktober 1945	1 pak
5653	Laporan dengan lampiran perihal penyediaan tenaga listrik di Banyumas, dibuat oleh Djawatan Listrik Daerah Banjumas-Purwokerto September 1945.	1 jilid
5654	Laporan dengan lampiran yang dibuat Badan Penolong Keluarga Korban Perang perihal tugas-tugas badan ini serta pelaksanaan tugas-tugas tersebut serta laporan kerja dari Badan Keamanan Rakjat yang berada di bawahnya. Oktober 1945. Badan Penolong Keluarga Korban Perang dan Badan Keamanan Rakjat	1 jilid

5655	Laporan tentang kejadian di Jakarta Raya dibuat oleh Kepala Polisi setempat; Oktober 1945.	1 jilid
5656	Keadaan tanaman di Jawa pada 1945; laporan tentang situasi pertanian di Jawa dengan beberapa duplikat. Oktober 1945	1 jilid
....	Beberapa catatan atau dokumen lepas memuat kuitansi, amplop lepas, tanda terima (tidak disalin) Oktober 1945 dan tanpa tanggal. Di simpan di Arsip Nasional di Jakarta; tidak ditemukan atau tersimpan fotokopinya di Arsip Nasional Belanda	1 jilid

Inventaris Koleksi Pringgodigdo nomor 5645 s.d. 5647 berhubungan dengan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pembahasan dasar Indonesia merdeka. Eksistensi dari Koleksi Pringgodigdo sebelum dikembalikan kepada ANRI, secara tersirat pernah disinggung oleh J.C.T Simorangkir dalam disertasinya yang dibukukan pada tahun 1984. Menurut J.C.T Simorangkir, ia menemukan dokumen dengan deskripsi sebagai berikut:

Dari bahan yang penulis jumpai di Algemeen Rijksarchief Algemene Secretarie I Kist XXV nr. 26 s'Gravenhage Negeri Belanda dalam susunan upacara pembukaannya ditulis "Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-oesaha Oentoek Persiapan Kemerdekaan". Sedang pada naskah nasihat Gunseikan penulis jumpai istilah "Badan Oentoek menjelidiki oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan...Dalam penelitian Penulis di luar Negeri, maka ternyata di Algemeen Rijksarchief di s'Gravenhage Negeri Belanda, terdapat bahan yang ditulis tangan berbunyi: "Ketua membentuk panitia kecil perancang Undang-undang Dasar terdiri atas Soepomo, Wongsonagoro, Soebardjo, Maramis, Singgih, Salim, Soekiman, Iin, Ketua Soepomo, Iin. Kewajiban Panitia Kecil: merancang Undang-undang Dasar, dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang telah dimajukan di Rapat Panitia Perancang Undang-undang Dasar.¹⁷

Berdasarkan keterangan J.C.T Simorangkir saat melakukan pemeriksaan dokumen untuk disertasinya di Belanda, ditemukan dokumen yang tertulis Badan Oentoek Menjelidiki Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan (terjemahan untuk *Dokuritu Zyunbi Tyo Sakai*) dan dokumen tersebut merupakan tulisan tangan. J.C.T Simorangkir tidak dapat melakukan identifikasi penulis dokumen, hanya menduga ditulis oleh sekretaris atau petugas BPUPK, selain itu tidak terdapat keterangan nama dokumen, hanya menyebutkan nomor dan tempat dokumen disimpan.

¹⁷ J.C.T Simorangkir, Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, hlm., 9 dan 13.

Tidak dijumpai juga apakah dokumen tersebut merupakan notulen sidang atau stenogram. Di dalam yang ditemukan olehnya memuat tiga hal, yaitu:

1. BPUPK melaksanakan rapat besar (rapat pleno);
2. Panitia hukum dasar dengan Ir. Soekarno sebagai ketua, disebut dalam dokumen tersebut sebagai Panitia Perancang Undang-Undang Dasar;
3. Panitia Kecil dengan Prof. Soepomo sebagai ketua, disebut sebagai Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar.¹⁸

Dokumen tersebut baru diketahui sebagai stenografi sidang BPUPK sekembalinya J.C.T Simorangkir ke Indonesia dan mewawancarai Moh. Hassan selaku anggota PPKI. kepadanya diberikan salinan stenografi sidang pembahasan Undang-Undang Dasar.¹⁹ Kembali kepada Koleksi Yamin, selain dipinjamkan kepada Muhammad Yamin, pada tahun 1957, Pratigny dari Departemen Luar Negeri pernah meminta salinan kepada A.G. Pringgodigdo untuk diperbanyak dalam bentuk stensil dan telah diberikan seadanya.²⁰ Menurut A.B. Kusuma, ada perbedaan risalah sidang yang diterbitkan Departemen Luar Negeri, yaitu pada beberapa bagian pada pidato Muhammad Yamin diberi tanda khusus berupa kotak untuk menandakan bahwa bagian tersebut tidak dapat disebut otentik.²¹

Sumber tertulis ketiga adalah Naskah Persiapan yang ditulis oleh Muhamamd Yamin. Naskah Persiapan diterbitkan oleh Yayasan Prapantja pada tahun 1959 dan diberi Kata Pengantar oleh Presiden Soekarno. Naskah Persiapan menjadi sumber utama penerbitan Risalah Sidang BPUPK 1 dan BPUPK 2 oleh Sekretariat Negara.

Koleksi Yamin, Koleksi Pringgodigdo dan Naskah Persiapan pada prinsipnya sama-sama memuat pidato mengenai perumusan dasar negara merdeka pada masa sidang pertama BPUPK tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Perbedaan di antara ketiganya adalah mengenai pencantuman siapa dan isi pidato pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam Naskah Persiapan, Risalah BPUPK 1, dan Risalah BPUPK 2 pada tanggal 29 Mei 1945 hanya ditampilkan pidato dari

¹⁸ Supra no. 17., hlm., 14

¹⁹ Id., hlm., 23

²⁰ Moh. Hatta, Ahmad Soebardjo, et.al, Uraian Pancasila, Mutiara, Jakarta, 1984, hlm., 79.

²¹ Supra no. 3, hlm., 6

Muhammad Yamin, pada tanggal 31 Mei 1945 hanya pidato Soepomo dan pada 1 Juni 1945 pidato Soekarno. Naskah Persiapan, Risalah BPUPK 1 dan Risalah BPUPK 2 tidak menjelaskan alasan mengapa hanya mencantumkan tiga orang saja. Ketiga pidato tersebut tidak mencantumkan asal-usul pertanyaan yang menyebabkan ketiga orang itu berpidato. Informasi mengapa muncul pidato dari ketiga orang tersebut dalam waktu yang berbeda dapat ditemukan dalam wasiat Mohammad Hatta kepada Guntur Soekarnoputra sebagai berikut:

Dekat pada akhir bulan Mei 1945 dr. Radjiman, ketua Panitia Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia, membuka sidang Panitia itu dengan mengemukakan pertanyaan kepada rapat: "Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya?. Kebanyakan anggota tidak mau menjawab pertanyaan itu, karena takut pertanyaan itu akan menimbulkan persoalan filosofi yang akan berpanjang-panjang"²²

Berdasarkan keterangan Mohammad Hatta, diperoleh informasi bahwa pada sidang perdana 29 Mei 1945, Radjiman Wediodiningrat selaku ketua BPUPK bertanya landasan filsafati dasar negara Indonesia merdeka kepada seluruh peserta sidang. Pertanyaan dari Radjiman Wediodiningrat tersebut ditanggapi oleh sebagian anggota BPUPK. Ada tiga tokoh yang dikenal mencoba menjawab pertanyaan itu, mereka adalah Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Di dalam Naskah Persiapan²³, Risalah BPUPK 1, dan Risalah BPUPK 2²⁴ pidato dari Muhammad Yamin berjudul "Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia" mengandung inti lima hal, yaitu:

1. Peri Kebangsaan;
2. Peri Kemanusiaan;
3. Peri Ketuhanan;
4. Peri Kerakyatan;
5. Kesejahteraan Rakyat.

²² Supra no. 20, hlm., 101

²³ Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, Prapantja, Djakarta, 1959, hlm., 87-88.

²⁴ Supra no. 8, hlm., 8-9

Hal tersebut juga diperkuat oleh Nugroho Notosutanto yang berpegangan kepada Naskah Persiapan.²⁵ Pada Risalah BPUPK 2, pidato Muhammad Yamin diberi catatan kaki bahwa pidato tersebut tidak terdapat di dalam Koleksi Yamin maupun Koleksi Pringgodigdo.²⁶ Pada penutup pidato 29 Mei 1945 dalam Naskah Persiapan, Risalah BPUPK 1, dan Risalah BPUPK 2 terdapat keterangan sebagai berikut:

Habislah pembicaraan tentang azas kemanusiaan, kebangsaan, kesejahteraan dan dasar yang tiga, yang diberi kerakhmatan Tuhan, yang semuanya akan menjadi tiang negara keselamatan yang akan dibentuk. Dengan ini saya mempersembahkan kepada sidang sebagai lampiran suatu rancangan sementara berisi perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dua hari yang lampau tuan Ketua memberi kesempatan kepada kita sekalian juga boleh mengeluarkan perasaan²⁷

Berdasarkan keterangan Risalah BPUPK 2 tersebut, pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpidato tentang dasar Indonesia merdeka, melampirkan rancangan Undang-Undang Dasar Sementara, dan ikut terbawa emosional menyatakan perasaan mengenai kemerdekaan Indonesia dua hari sebelum tanggal 29 Mei 1945. Catatan kaki Risalah BPUPK 2 tentang tidak ditemukannya pidato Muhammad Yamin pada Koleksi Muhammad Yamin dan Koleksi Pringgodigdo menimbulkan permasalahan, jika tidak terdapat pada kedua dokumen tersebut, maka pidato yang dicantumkan Muhammad Yamin pada Naskah Persiapan, Risalah BPUPK 1 dan Risalah BPUPK 2 tidak jelas asal-usulnya. Notulen sidang tanggal 29 Mei 1945 dari Koleksi Pringgodigdo memuat pidato Muhammad Yamin sebagai berikut:²⁸

²⁵ Supra no. 7, hlm., 53

²⁶ Supra no. 8, hlm., 8

²⁷ Id., hlm., 28

²⁸ Risalah Sidang 29 Mei 1945 ditulis sebagaimana terdapat dalam *Archivalia van Raden Mas A.G. Pringgodigdo* dan membandingkannya dengan buku Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 karya A.B. Kusuma.

Muh. Yamin²⁹

DOKURITU ZYUNBI TYOSA KAI

Bahan djangan sadja ditjari di Djawa, tetapi di seloeoroeh Ind Borneo, Selebes, Maloekoe, Malaja, Soematra dan Soenda Ketjil.

Tiga oesaha jang haroes dilakoekan:

1. Mengoempoelkan bahan oentk. pemb neg
2. Menjoesoen oendang2 dasar negara
3. Mendjalankan isi hoekoem dasar neg. Ind

Ind. Merdeka, sekarang!

I. Etat nation=nationale staat=negara kebangsaan

Dasar kemerdekaan=kedaoelatan ke dalam dan kedaoelatan ke loear

Ked. kedalam=memberi perlindoengan dan pengawasan pada poetra negeri

Ked. keluar=kesempatan loeas mengatoer pertalianja dengan negara lain

Boekan dominion, protectoraat, mandaat, Atlantic Charter

Toedjoean II dasar kemanusiaan

Kemerdekaan (internasionalisme)

dasar kedaoelatan rakjat

ataoe kedaoelatan negara

III. KeToehanan

Peradaban Ind mempoenjai

Toehan jang Maha Esa

IV. Dasar jang tiga

A. Permoesjawaratan (Qoeran)-moefakat (adat)

B. Perwakilan (adat)

C. Kebidjaksanaan (rasionalisme)

1. Negara Repoeblik Ind: I. Repoeblik, negara Kesatoean, faham unitarisme

II. Satoe kedaoelatan: jang didjoendjoeng oleh Kepala Negara, daerah, dan rakjat

III. Kepala Negara, pemerintah daerah dan pemerintah persekoetoean desa (nagari, marga, dll) dipilih setjara Timoer dalam permoesjawaratan jang disoesoen setjara rakjat. Pemerintahan Sjariah

IV. Permoesjawaratan, pemilihan, dan pembaroean pikiran mendjadi dasar pengangkatan dari sagala pemoetoesan oeroesan Negara

V. Nagari, desa dan sagala persekoetoean hukum adat jang diperbaroei dengan djalan rasionalisme dan pembaroean djaman, dijadiakan kaki soesoenan negara sebagai bagian bawah

²⁹ Notulensi pidato tidak berjudul Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 terdiri atas 2 lembar. Pada lembar pertama hilang 1/3 halaman, sebagaimana penulis dapatkan dari inventaris nomor 5645 dan 5646 *National Archief* Belanda. Hal ini karena keteledoran dari *National Archief* ketika menyalin dari notulen asli yang dikembalikan ke ANRI pada tahun 1987.

- VI. Pemerintah Pusat dibentuk dikelilingi Kepala Negara
 terjadi atas: a. dua orang wakil kepala Negara
 b. satu kementerian dikelilingi seorang Perdana Menteri
 c. Pusat parlemen badan-badan perwakilan, yang terbagi
 atas Balai Pertahanan dan Balai Perwakilan Rakyat

Muh. Yamin

2

DOKURITU ZYUNBI TYOSA KAI

- VII. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah
 sebagai Pemerintah Daerah. Untuk pemerintah Oeroesan dalam,
 Pangreh Pradja sekarang mementingkan kekeuasaan kepada Negara
 Ind dan Pemerintah. Urusan dalam negeri bagi seluruh Ind disoesoen
 kembali
- VIII. Pekerjiaan atas jalan desentralisasi atau dekonsentrasi
 yang tidak mengenal federalisme atau pepetjahan negara
- IX. Ind Mendjadi anggota yang berkedaulatan dalam permoesjawaratan
 bangsa2 ATR dan dalam persaoedaraan bangsa2 sedoenia Negara
 Rakyat Ind. Bukan negara golongan, negara angkatan atau negara
 bangsawan
2. Pembelaan: Perang jihad (agama)-perang keraman (adat)
 menyempurnakan teknik dan disiplin peperangan dan menjusun
 siasat perang (rasionalisme)
3. Boedi Negara (moral) Ind yang ketiga
 a. Setia negara= rasa kebaktian (Sjailendra-Sriwidjaja) I
 b. Tenaga rakyat= kekuatan rakyat (Madjapahit-Gadjah Mada) II
 c. Kemerdekaan= ingin merdeka (Ind Merdeka) III
- V Kesedjahteraan Rakyat: Perobahan besar tentang kesejahteraan
 yang mengenai kehidupan ekonomi dan sosial sehari-hari yang
 mengenai diri poetra negeri
- a. Daerah Negara. Kemaoean angkata moeda Ind. Soematera
 Djawa, Malaja, Borneo, Selebes, Soenda Ketjil, Maloekoe, Papoea
- b. Pendoedoek dan Poetera Negara. Sebeloem hari pelantikan Negara
 diadakan ketentoean tentang kedoedoekan golongan Peranakan Arab
 dan Tionghoa. Jalan memasoeki daerah kepoeteraan terboeka
 selama-lamanja³⁰
- c. Bentuk Negara: berkat bantoean Bala D.N. dan berkat kesoenggoehan
 perdoangan rakyat Ind ditakdirkan oleh Toehan kita naik dari
 kedoedoekan djadjahan mendjadi rakyat Negara Merdeka
 Sjair Repoeblik Indonesia³¹

³⁰ Di dalam buku A.B. Kusuma yang berjudul "Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945" tertulis
 "seluas-luasnya"

³¹ A.B. Kusuma, supra no.4, hlm., 99 tertulis "Syair Indonesia Merdeka"

Berdasarkan notulen dari Koleksi Pringgodigdo, tidak ditemukan lima jenis dasar Indonesia merdeka sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Yamin dalam Naskah Persiapan. Isi notulen dalam Koleksi Pringgodigdo hanya memberikan informasi tentang gambaran idealnya negara yang sudah merdeka dengan tiga dasar. Bila mengikuti alur Muhammad Yamin dalam bukunya Naskah Persiapan dan Nugroho Notosutanto bahwa pada tanggal tersebut Muhammad Yamin menjabarkan dasar Indonesia ketika merdeka, maka hanya tiga dasar saja, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. Sementara kebangsaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan adalah asas. Tetapi asumsi tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan karena Panji Soeroso selaku *Fuku Kaityo* (Wakil Ketua) menegur³² Muhammad Yamin sebanyak empat kali karena dianggap tidak menjawab pertanyaan mengenai landasan filsafati dasar Indonesia merdeka yang diajukan oleh Radjiman Wediodiningrat. Dengan kata lain pidato Muhammad Yamin yang panjang sebagaimana dimuat dalam Naskah Persiapan dan Risalah BPUPK 1 serta 2 tidak menyentuh substansi permasalahan yang diajukan. Pada akhir pidato Muhammad Yamin menyatakan telah mengeluarkan perasaan pada dua hari sebelum sidang perdana 29 Mei 1945. Menjadi tanda tanya besar terhadap klaim Muhammad Yamin dalam bukunya itu jika dia, oleh Radjiman Wedioningrat, diberi kesempatan mengeluarkan perasaannya dua hari sebelumnya, yang berarti pada tanggal 27 Mei 1945, padahal pada tanggal tersebut BPUPK belum mengadakan rapat dan diresmikan. Dengan demikian dapat disimpulkan pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin tidak mengajukan landasan filsafati dasar Indonesia merdeka yang berjumlah lima.

Koleksi Pringgodigdo memuat nama-nama anggota BPUPK yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Nama-nama anggota yang berpidato tetapi sengaja tidak dicantumkan bersama pidato mereka dalam Naskah Persiapan, Risalah BPUPK 1 dan Risalah BPUPK 2, yaitu: Margono, Sosrodiningrat, Soemitro, Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Soedirman, Dasaad, Rooseno, dan Aris, kecuali Margono yang naskah pidatonya belum ditemukan,

³² Supra no. 23, hlm., 99-105.

pidato pada tanggal 29 Mei 1945 tersedia dalam bentuk notulen dan stenogram.³³ Tanggal 30 Mei 1945, ada sembilan orang yang berpidato pada sidang BPUPK. Naskah Persiapan, Risalah BPUPK 1, dan Risalah BPUPK 2 tidak mencantumkan isi pidato dari 9 orang tersebut. Sembilan orang tersebut adalah: Hatta, H. Agoes Salim, Samsuudin, Wongsonagoro, Soerachman, Soewandi, A. Rachim, Soekiman, dan Soetardjo.³⁴ Dalam Koleksi Pringgodigdo, pidato yang berhasil ditemukan adalah pidato dari Wongsonagoro dan A. Rachim Pratalykrama dalam bentuk notulen. Isi pidato kedua orang itu yang berhubungan dengan dasar Indonesia merdeka sebagai berikut:

WONGSONAGORO

Pembentukan negara baru dilakukan dengan 2 tingkatan atau 2 angsuran:

Penyusunan Pemerintahan luar biasa buat sementara waktu. Bersifat istimewa dan berkewajiban menyelesaikan peperangan ini

Dan berkewajiban mempersiapkan pemerintahan yang tetap. Harus menjalankan usaha mengurus kemajuan dan hasrat rakyat pada umumnya, baik tentang susunan dan corak negara, maupun tentang aturan dasar (*grondwet*), pun cara pemilihan wakil rakyat. Minta diberi aturan dasar Mancukuo, Tiongkok, Philipina sebagai contoh. Peradaban batin harus dipertinggi. Jangan mementingkan diri sendiri *Mission Sacree* mewajibkan kita turut menyusun kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dan membantu menertibkan seluruh dunia dengan Hakko Ittiu.³⁵

PRATALYKRAMA

Negara Indonesia: Kepala dipilih rakyat, punya Perdana Menteri dan Kabinet

Badan Perwakilan Rakyat: Majelis Luhur dan Majelis Rendah, yang anggotanya dipilih oleh rakyat

Keluar: Satu Negara di dalam: beberapa daerah pemerintahan dan kota-kota yang masing-masing otonomi dengan tunduk pada pimpinan Kepala Negara Indonesia

Pembelaan: milisi umum sebelumnya itu diadakan gemblengan bagi rakyat di juken-juken sebagai sekarang, buat menimbulkan semangat berkorban buat tanah air

Pendidikan: kewajiban belajar

³³ Sama dengan catatan kaki nomor 31, beberapa notulensi hilang 1/3 karena kesalahan penyalinan.

³⁴ Supra no. 5, hlm.,119-120

³⁵ Archivalia van Raden Mas mr Abdul Gaffar Pringgodigdo, *destijds Secretaris van Staat van de Republiek Indonesië* Nr. 5645-5647

Perekonomian: ekonomi dalam arti seluas-luasnya perlu diperluas dan diperdalam dan disegala lapangan misalnya nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan. Aturan-aturan hak tanah-tanah komunal dihapuskan, tanah erpacht...Dan opstal harus dikembalikan kepada rakyat via pemerintah

Dasar negara: persatuan rakyat sekokoh-kokohnya. Agama Islam 95% dari penduduk beragama dan Kepala Negara harus seorang muslim. Islam sebagai Agama Negara dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi penduduk untuk memeluk agama yang bukan Islam

Permulaan pembangunan Negara harus minta bantuan kepada Dai Nippon berupa penasehat-penasehat dan lain-lain³⁶

Berdasarkan 2 pidato tersebut, A. Rachim Pratalykrama yang dengan jelas berbicara mengenai dasar Indonesia merdeka, yaitu persatuan yang didasarkan atas rakyat yang kokoh. Selain itu juga diusulkan bahwa kepala negara harus beragama Islam, Islam sebagai agama negara, serta kebebasan menjalankan agama selain Islam sesuai yang diinginkannya. Pidato Hatta meskipun belum ditemukan, secara garis besar membahas mengenai pemisahan agama dan negara. Hatta sendiri tidak menjawab dengan jelas pertanyaan Radjiman Wediodiningrat. Dalam pidatonya dijelaskan konsep sekularisme dipraktikan di negara-negara Barat. Paus dianggap sebagai raja sekaligus pemuka agama, sehingga menimbulkan pertentangan terus-menerus. Dalam konteks Indonesia hal itu tidak dibenarkan karena agama dan negara saling mengisi.³⁷

Sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945 terdapat 14 orang anggota yang berbicara, tidak hanya Soepomo saja yang berpidato hari itu. Mereka adalah: Abdul Kadir, Soepomo, Hendromartono, Muhammad Yamin, Sanoesi, Liem Koen Hian, Moenandar, Dahler, Soekarno, Ki Bagoes Hadikoesoemo³⁸, Koesoema Atmaja, Oei Tjong Hauw, Parada Harahap, dan Boentaran.³⁹ Selain pidato

³⁶ Id.

³⁷ Supra no. 7, hlm., 83.

³⁸ Pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo tidak terdapat dalam Koleksi Pringgodigdo, Koleksi Yamin, dan Naskah Persiapan. Pidato dalam "Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia" edisi 1998 diambil dari arsip keluarga Ki Bagoes Hadikoesoemo yang diserahkan oleh puteranya yang bernama Kolonel (L) Basmal Hadikoesoemo kepada Sekretariat Negara, sedangkan pidato di dalam buku "Lahirnya Undang-undang Dasar 1945" karya A.B. Kusuma diambil dari buku "Ki Bagus Hadikoesoemo" terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982.

³⁹ Supra no. 3, hlm., 121.

Soepomo, notulen pidato yang sementara berhasil ditemukan adalah notulen pidato Abdul Kadir, Dahler, dan Liem Koen Hian. Pidato pada tanggal 31 Mei 1945 yang masyhur adalah pidato dari Soepomo, ia mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Radjiman Wediodiningrat tentang dasar Indonesia merdeka. Menurut Nugroho Notosutanto⁴⁰, pidato Soepomo pada hari itu berisi lima dasar Indonesia merdeka, yaitu:

1. Persatuan;
2. Kekeluargaan;
3. Keseimbangan lahir dan batin;
4. Musyawarah;
5. Keadilan rakyat.

Soepomo sendiri tidak pernah menyebut dalam pidatonya kelima hal itu sebagai dasar Indonesia merdeka atau bahkan menyebutnya dengan istilah Pancasila. Kelima hal tersebut barulah ditafsirkan dikemudian hari oleh Nugroho Notosutanto.⁴¹ Jika melihat pidato Soepomo seutuhnya⁴², maka konteks pidato Soepomo berbicara mengenai struktur sosial Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat, yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat. Soepomo juga menyebutkan mengenai aliran pikiran (*staatsidee*) Indonesia nantinya, yaitu negara yang integralistik.⁴³ Dalam hubungan antara agama dan negara, Soepomo sependapat dengan pidato Hatta pada tanggal 30 Mei 1945, yaitu mengenai pemisahan antara agama dan negara. Dengan kata lain, sependapat harus ada pemisahan antara urusan keagamaan dan urusan kenegaraan.⁴⁴ Berdasarkan hal itu, maka pada tanggal 31 Mei 1945 Soepomo tidak menjelaskan dasar Indonesia merdeka yang berjumlah lima.

⁴⁰ Supra no. 7, hlm., 53.

⁴¹ Id., hlm. 26

⁴² Supra no. 4, hlm. 35-36.

⁴³ Supra no. 8., hlm., 36.

⁴⁴ Id, hlm. 38-39

Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno diberikan kesempatan untuk berpidato mengenai dasar Indonesia merdeka. Pidato tersebut dimulai dengan koreksi Soekarno atas pidato-pidato para anggota BPUPK yang selama tiga hari berturut-turut tidak menjawab pertanyaan dari Radjiman Wediodiningrat. Menurut Soekarno, yang ditanyakan oleh Radjiman Wediodiningrat sebenarnya adalah dasar Indonesia merdeka dalam artian *philosofische grondslag*.

Maaf, beriboe maaf! Banjak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itoe dioetarakan hal-hal jang sebenarnja boekan permintaan padoeka toean Ketoea jang mulia, jaitoe boekan dasarnja Indonesia Merdeka. Menoeoroet anggapan saja, jang diminta oleh Padoeka toean Ketoea jang moelia ialah, dalam bahasa Belanda: "*Philosofische grondslag*" daripada Indonesia Merdeka. *Philosofische grondslag* itoelah poendamen, filsafat, pikiran-jang-sedalam-dalamnja, djiwa, hasrat-jang sedalam-dalamnja oentoek diatasnja didirikan gedoeng Indonesia Merdeka jang kekal dan abadi⁴⁵.

Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 tentang dasar Indonesia merdeka yang dikenal dengan sebutan Pancasila, terdiri atas lima hal: ⁴⁶

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme-atau peri-kemanoesiaan
3. Moefakat-atau demokrasi
4. Kesedjahteraan sosial
5. Ketoehanan

Berdasarkan hal tersebut, baru pada tanggal 1 Juni 1945 ada usulan lima dasar Indonesia merdeka yang diperkenalkan kepada sidang BPUPK dengan nama Pancasila dan juga menjawab pertanyaan Radjiman Wediodiningrat. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut kemudian disebarluaskan dan diterbitkan pertama kali oleh Oesaha Penerbitan Goentoer pada tahun 1947 di Jogjakarta. Dalam penerbitan tersebut Radjiman Wediodiningrat memberikan kata pengantar dan menjelaskan pula sumber naskah:

"Lahirnja Pantja Sila" ini adalah boeah "stenografisch verslag" dari pidato Boeng Karno jang dioetjapkan dengan tidak tertoeelis dahoeloe (voor de vuist) dalam sidang jang pertama pada tanggal 1 Djoeni 1945

⁴⁵ Soekarno, Lahirnja Pantja Sila: Boeng Karno menggembleng dasar-dasar Indonesia merdeka, Oesaha Penerbitan Goentoer, Jogjakarta, 1947, hlm., 1.

⁴⁶ Id., hlm. 33

ketika sidang membitjarakan “Dasar (beginsel) Negara kita”...Bila kita peladjar dan selidiki soenggoeh-soenggoeh “Lahirnja Pantja Sila” ini, akan ternjata bahwa ini adalah soeatoe Demokratische Beginsel, soeatoe Beginsel jang mendjadi Dasar Negara kita, jang mendjadi Rechtsideologie Negara kita.

Radjiman Wediodiningrat selain menjelaskan mengenai sumber naskah penerbitan, juga mengakui bahwa pidato Soekarno 1 Juni 1945 adalah pidato yang bisa menjawab pertanyaan dasar Indonesia merdeka yang diajukannya pada sidang tanggal 29 Mei 1945. Dasar Indonesia merdeka yang dimaksudkan oleh Radjiman Wediodiningrat tidak lain adalah dasar negara Indonesia. Dengan disebutnya Pancasila dalam kalimat “beginsel yang menjadi dasar negara kita” dan *rechtsideologie* (ideologi hukum) menjadi jelas bahwa pidato 1 Juni 1945 merupakan satu-satunya pidato yang menyebut secara jelas istilah Pancasila sebagai dasar kelak Indonesia merdeka. Nugroho Notosutanto dengan mendasarkan pada tulisan dari A.G. Pringgodigdo, berusaha mengatakan bahwa selain Soekarno, Muhammad Yamin dan Soepomo dapat dikatakan sebagai penggali Pancasila.⁴⁷ Tulisan dari A.G. Pringgodigdo tersebut berasal dari stensil yang berjudul “Sekitar Pancasila” yang diterbitkan tahun 1970 oleh Kodam VIII Brawijaya. Pada tahun 1975 A.G. Pringgodigdo menjadi anggota Panitia Lima yang bertugas menyusun uraian tentang lima sila dari Pancasila dan pada tahun 1977 hasil pertemuan Panitia Lima diterbitkan dengan judul Uraian Pancasila. Dalam uraian tentang sejarah lahirnya Pancasila hanya disebutkan nama Soekarno saja yang mengucapkan istilah tersebut.⁴⁸ Dengan demikian menyebut Muhammad Yamin dan Soepomo sebagai pihak yang turut mengemukakan istilah Pancasila yang didasarkan atas tulisan A.G. Pringgodigdo tidak tepat, karena A.G. Pringgodigdo sendiri “mengubah” pendiriannya dengan ikut serta menandatangani hasil Panitia Lima yang didalamnya secara jelas menyebutkan Soekarno sebagai orang yang pertama mengemukakan istilah Pancasila. Alasan lainnya adalah pidato Muhammad Yamin dan Soepomo tidak pernah sama sekali menyebut istilah Pancasila atau sekedar membagi dasar menjadi lima.

⁴⁷ Supra no. 7, hlm., 67.

⁴⁸ Supra no. 20, hlm., 25.

Pidato 1 Juni 1945 merupakan pidato yang pertama diterbitkan mendahului penerbitan risalah sidang. Antara Naskah Persiapan, Risalah BPUPK 1, dan Risalah BPUPK dengan terbitan Oesaha Penerbitan Goentoer dan Penerbitan Khusus Departemen Penerangan memiliki perbedaan terkait pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Risalah BPUPK 1 dan Risalah BPUPK 2 merupakan produk salin tempel dan sunting ejaan dari Naskah Persiapan karya Muhammad Yamin sehingga substansi selain kesalahan ejaan sudah pasti terbawa. Sementara itu Penerbitan Khusus dari Departemen Penerangan mendasarkan atas terbitan dari Oesaha Penerbitan Goentoer, sehingga substansi selain ejaan yang diperbarui akan sama pula. Hal ini sebagaimana diakui oleh Departemen Penerangan selaku penerbit pidato “Lahirnja Pantja Sila”:

Pidato Bung Karno tersebut kemudian dinamakan “Lahirnya Pantja-Sila” yang pernah dibukukan oleh Penerbit “Oesaha Penerbitan Goentoer” tahun 1947 di Jogjakarta. Isi penerbitan tersebut menjadi bahan-utama bagi Penerbitan Khusus Deppen sekarang dengan beberapa perubahan kata pengantarnya dan edjaannya disesuaikan dengan edjaan yang baru.

Hal yang perlu diperhatikan Naskah Persiapan, Risalah BPUPK 1, dan Risalah BPUPK 2 tidak ada kata pengantar dari Radjiman Wediodiningrat. Konsekuensinya manakala ada perbedaan karena kesalahan ketik maupun substansi antara stenogram dengan naskah buku tidak akan diketahui. Peneliti berpendapat, sebelum diterbitkan, rancangannya sudah dibaca terlebih dulu oleh Radjiman Wediodiningrat, lalu setelah menurutnya tidak terdapat kesalahan substansial, barulah buku diterbitkan. Tidak mungkin Radjiman Wediodiningrat gegabah menyetujui penerbitan, apalagi terdapat kata pengantar atas nama dirinya ketika menjabat ketua BPUPK, tanpa memeriksanya terlebih dulu. Hal itu diperkuat dengan pernyataan Radjiman bahwa memang substansinya sama.⁴⁹ Artinya Radjiman Wediodiningrat tahu persis pidato lisan 1 Juni 1945 adalah pidato yang mencantumkan istilah Pancasila.

⁴⁹ Supra no. 45, hlm. 3-4.

Naskah Persiapan memuat pidato 1 Juni 1945 mengenai Pancasila pada prinsip Ketuhanan sebagai berikut:

Prinsip K e t u h a n a n! Bukan sadja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknja ber-Tuhan. Tuhanja sendiri. Jang Kristen menjembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, jang belum ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w, orang Buddha mendjalankan ibadatnja menurut kitab-kitab jang ada padanja⁵⁰

Hal yang sama terdapat pada Risalah BPUPK 1 dan Risalah BPUPK 2:

Prinsip K e t u h a n a n! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah menurut petunjuk Isa al Masih, yang belum ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad saw, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya.⁵¹

Kalimat “yang belum ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad” tidak tepat. Selain secara struktur bahasa ganjil, berdasarkan konteks pembicaraan tersebut adalah mengenai ber-Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing. Pada teks terbitan “Oesaha Penebitan Goentoer” tertulis sebagai berikut:

Prinsip Ketoehanan! Boekan sadja bangsa Indonesia bertoehan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknja bertoehan Toehannja sendiri. Jang Kristen menjembah Toehan menoeeroet petoendjok Isa al Masih, jang Islam bertoehan menoeeroet petoendjoek Nabi Moehamad s.a.w., orang Boeddha mendjalankan ibadatnja menoeeroet kitab-kitab jang ada padanja.⁵²

Naskah Persiapan, Risalah BPUPK 1 dan Risalah BPUPK 2 tertulis “yang belum ber-Tuhan” sedangkan dalam terbitan Oesaha Penerbitan Goentoer dan Penerbitan Chusus Departemen Penerangan tertulis “yang beragama Islam”. Perbedaan tersebut tidak dapat dipandang sekedar salah ketik, tetapi mengubah makna. Hal ini menunjukkan bahwa Naskah Persiapan diragukan keautentikannya sehingga dapat dikesampingkan sebagai rujukan.

⁵⁰ Supra no. 23, hlm. 77.

⁵¹ Supra no. 8, hlm. 80.

⁵² Supra no. 45, hlm. 34.

Koleksi Yamin dan Koleksi Pringgodigdo yang berisi stenogram dan notulen tidak mencantumkan kalimat “yang belum ber-Tuhan”, sehingga diketahui bahwa Naskah Persiapan tidak mengutip stenogram dan notulen kata demi kata darinya. Sehingga yang dapat dikategorikan sebagai sumber autentik hanya Koleksi Yamin dan Koleksi Pringgodigdo.

Berdasarkan hal tersebut, Naskah Persiapan yang dijadikan sumber Risalah BPUPK 1 dan Risalah BPUPK 2 tidak berdasarkan kata demi kata (*woordelijk*) dari notulen sidang (*notulistisch verslag*) autentik BPUPK, sehingga klaim Nugroho Notosutanto bahwa Naskah Persiapan merupakan sumber autentik, gugur.

Penutup

Koleksi Pringgodigdo dan Koleksi Yamin adalah sumber tertulis autentik tentang perumusan sejarah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka dalam masa sidang pertama Badan Untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Tanggal 29 Mei-1 Juni 1945, sedangkan Naskah Persiapan karya Muhammad Yamin bukan merupakan sumber tertulis autentik karena tidak dicetak kata demi kata (*woordelijk*) dari notulen sidang (*notulistisch verslag*) resmi BPUPK.

Sekretariat Negara perlu menerbitkan edisi pemutakhiran Risalah BPUPK yang didasarkan murni dari Koleksi Yamin dan Koleksi Pringgodigdo dengan mengesampingkan Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 karya Muhammad Yamin yang tidak autentik.

Daftar Pustaka

Buku

- A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2009.
- A.G. Pringgodigdo, Perjuangan Bangsa Indonesia Menegakkan Pancasila Dalam Masa Penjajahan/Pendudukan Jepang, Jakarta

- _____, Tatanegara di Djawa Pada Waktu Pendudukan Djepang dari Bulan Maret sampai bulan Desember 1942, Jajasan Fonds Universiteit Gadjah Mada, Jogjakarta, 1952.
- J.C.T Simorangkir, Penetapan UUD Dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Lembaga Soekarno Hatta, Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, Inti Idayu Press, Jakarta, 1986.
- Moh. Hatta, Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, et.al., Uraian Pancasila, Mutiara, Jakarta, 1984.
- Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945 Djilid 1, Prapantja, Djakarta, 1959.
- Notosutanto, Nugroho, Proses Penyusunan Pancasila Dasar Negara, Balai Pustaka, Jakarta, 1981.
- Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-udaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara, Jakarta, 1995.
- Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-udaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara, Jakarta, 1998.
- Soekarno, Lahirnja Pantja Sila: Boeng Karno Menggembleng Dasar-dasar Indonesia merdeka, Oesaha Penerbitan Goentoer, Jogjakarta, 1947.
- Sukarno, Lahirnja Pantja-Sila, Departemen Penerangan, Djakarta, 1960.

Dokumen

Archivalia van Raden Mas mr Abdul Gaffar Pringgodigdo, destijds Secretaris van Staat van de Republiek Indonesië Nr. 5645 Zittingsverslagen, notulen en aantekeningen betreffende de vergaderingen van de Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai (Badan untuk Menjelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) en de hieruit onstane Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

_____ Nr. 5646 *Stukken bevattende concept-voorstellen voor de Grondwet van Indonesie, de landsverdediging, de staatfinancien, en de economie*

_____ Nr. 5647 *'Indonesia merdeka selekas-lekasnya' manifest zoals vastgesteid door de leden van de Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai*

Website

<http://www.jstor.org/stable/41288761?origin=JSTOR-pdf>, diakses tanggal 25 Januari 2017

<https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/33293/9/03.pdf>, diakses tanggal 25 Januari 2017